

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis Indonesia yang terjadi tahun 1997 dimulai adanya krisis value tukar rupiah terhadap dolar AS yang menyebabkan hilangnya kepercayaan pasar dan publik. Selain itu Indonesia juga mengalami krisis moneter sehingga berdampak pada ekonomi yang semakin menurun. Hal ini menjadi pengingat agar dapat mencermati pembangunan ekonomi kokoh dan bisa tak beranjak dalam keadaan apa pun.

Usaha mini dan menengah sudah membuat masalah yang baik guna dilihat dan ditangani di bidang-bidang berikut:

- a. Di masa krisis, sektor UMKM bisa bertahan sekarang
- b. Tidak ada pengawasan pemerintah terhadap proyek UMKM
- c. Banyak fasilitas UMKM dikaitkan dengan peningkatan produktivitas
- d. Operasional UMKM menggenggam bagian urgent dan menyerahkan sumbangan besar terhadap desain dalam perekonomian negara.

UMKM sekarang sedang didera persoalan dan tantangan menghadapi perekonomian mengglobal. Dengan adanya pembatasan, UMKM dianggap sebagai andalan industri di Indonesia. UMKM memiliki peran urgent dalam menambah penghasilan masyarakat dan meluaskan peluang kerja.

Agar UMKM bisa maju di kelas go international, Bank Indonesia telah menjabarkan beberapa langkah seperti praktik batik tradisional pada event-event penting, sejak didirikan pada pertengahan Agustus 2020 lalu dia mengadvokasi produk-produk buatan UMKM di Indonesia di berbagai acara konferensi nasional, misalnya dalam konferensi bisnis internasional. Bahkan pada Maret 2021, BI bangga menjadi pemimpin produk buatan Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, berjanji akan terus mengkampanyekan Proud Made in Indonesia di setiap acara.

BI akan terus mendukung UMKM binaan yang telah mencapai 1.200 UMKM di seluruh platform, ke 46 situs perwakilan. UMKM yang memproduksi makanan dan minuman, makanan, dan kain dari nusantara dengan nilai jual kembali yang baik. Setiap tahun BI menghadirkan karya-karya kreatif Indonesia yang biasanya dibuka langsung oleh Presiden atau Ibu Negara. BI juga

memperkenalkan UMKM kami di seluruh dunia, termasuk di Singapura dan banyak negara lainnya. BI juga menyelenggarakan 70 event untuk mendukung UMKM, sekitar 70.000 UMKM native berpartisipasi dalam semua event BI. Langkah terakhir adalah digitalisasi UMKM. Dukungan tersebut tercermin dalam pembentukan kode QR nasional, yaitu Indonesia Response Model (QRIS). Ia mencatat pada 2020 akan ada sekitar 5,8 juta merchant yang berpartisipasi. Pada 2021, BI menargetkan 12 juta UMKM untuk mengaktifkan QRIS. Selain itu, BI masih mengupdate BI Payments secara cepat atau 24 jam dalam 7 hari dan secara real time. Hal ini untuk memudahkan dan mempercepat pasar pembayaran, khususnya jumlah UMKM. Namun, Perry mengimbau seluruh pemangku kepentingan, pemangku kepentingan, perbankan untuk terus berbenah dan berkolaborasi. Hal ini untuk memudahkan dan mempercepat pasar pembayaran, khususnya jumlah UMKM. Namun, Perry mengimbau seluruh pemangku kepentingan, pemangku kepentingan, perbankan untuk terus berbenah dan berkolaborasi. Hal ini untuk memudahkan dan mempercepat pasar pembayaran, khususnya jumlah UMKM. Namun, Perry mengimbau seluruh pemangku kepentingan, pemangku kepentingan, perbankan untuk terus berbenah dan berkolaborasi.

Namun disisi lain, UMKM menghadapi banyak masalah, seperti investasi yang tidak mencukupi, distribusi barang, masalah ini menyebabkan peningkatan penggunaan kembali Internet, tetapi lebih banyak akses tetapi belum efektif. Pengusaha harus terbuka terhadap penggunaan teknologi. Melalui e-commerce, rantai pasok bisa menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga distribusi produk juga dapat lebih menguntungkan dan penjualan dapat meningkat. Permasalahan selanjutnya adalah belum adanya Surat Izin Usaha (SIUP), arsip, arsip ini masih menjadi yang sering diterapi para staf UMKM yang jalur ini rawan hilang, rusak, dan bahkan mengulangi kesalahan. Dengan demikian, staf UMKM dapat menggunakan teknologi seperti software aplikasi dan laporan keuangan dengan mudah dengan biaya yang bersahabat, sehingga proses bisnis dapat lebih mendukung dengan metode yang lebih detail, praktis, dan bermanfaat. Dan masalah terakhir adalah bisnis online yang belum disetujui sehingga perlu ide yang baik, penjualan melalui UMKM dapat meningkat yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi komunitas lain. sehingga proses bisnis dapat didukung dengan metode yang lebih detail, praktis, dan hemat biaya. Dan masalah terakhir adalah bisnis online yang belum disetujui sehingga perlu ide

yang baik, penjualan melalui UMKM dapat meningkat yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi komunitas lain. sehingga proses bisnis dapat didukung dengan metode yang lebih detail, praktis, dan hemat biaya. Dan masalah terakhir adalah bisnis online yang belum disetujui sehingga perlu ide yang baik, penjualan melalui UMKM dapat meningkat yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi komunitas lain.

Karena permasalahan yang ditimbulkan oleh UMKM, Presiden SBY meluncurkan inisiatif Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 5 November 2007. KUR telah terbukti berperan besar dalam pengembangan UMKM dan akan terus menipiskan kemiskinan. Tipe usaha yang diperoleh KUR antara lain industri, pertanian, telekomunikasi dan lainnya. Operasional KUR beroperasi selama 7 tahun (2007-2014). Untuk saat ini pendistribusian KUR sudah berubah karena melewati target, namun ketua rapat hadir pada 15 Desember 2014 Pengerjaan KUR segera diputuskan pada 2015 dengan berbagai perbaikan. Banyak pembenahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan KUR, terutama BPK yang menuturkan jika realitas tujuan kegiatan KUR tidak bisa dikendalikan. Beberapa perbaikan disebut sebagai; pengembangan aturan dan kerangka KUR. Perbaikan manajemen ialah:

- a. Penataan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Keuangan Usaha sempit, mini, dan Menengah
- b. Rencana Aksi Pengamanan Kebijakan Penggunaan KUR
- c. Penyampaian PMK Tata Cara Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Manusia Lembaga Keuangan (KUR)
- d. Kebijakan Pengawas Tata Usaha Perusahaan Keuangan dan Jasa
- e. KUR 2015

Rapat Dewan Komite Kebijakan Keuangan untuk UMKM pada tanggal 13 Mei 2015 disetujui untuk cepat menyelesaikan pasar product KUR sempit dengan tingkat bunga 21% per tahun. Hal ini ditindaklanjuti oleh Persatuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman Pelaksanaan KUR mikro.

16 Juni 2015 Rapat Kabinet dibatasi, keputusan adalah bertujuan untuk mengurangkan bunga KUR jadi 12% pertahun. Kemudian atas arah tersebut, Komite Kebijakan meninjau ulang guna memilih pola dan pendanaan yang tepat untuk program KUR. Dari rapat Komite Keuangan UMKM pada 26 Juni 2015,

ditetapkan KUR dibagi menjadi dua, yakni KUR mikro dan retail. subsidi yang dibagi pemerintah ialah bunga penyalur awal seperti Bank Rakyat Indonesia, Mandiri, dan Bank Negara Indonesia. Pada tahun 2021 PT Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya mendapatkan kuota penyaluran KUR Rp. 450.000.000.000 dengan suku bunga KUR 6% pertahun efektif.

Kemudian perbedaan kebijakan subsidi pemerintah dari imbal jasa Penjaminan menjadi subsidi bunga ini telah diumumkan Perpres 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Perpres, Pasal 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan KUR. 15 Juli 2015 amandemen tersebut ialah step menuju perubahan aturan untuk mengimbangi perubahan bentuk hibah pemerintah dari kewajiban menjadi bunga. Dalam rangka percepatan penyelesaian KUR, Direktur Sistem Manajemen Kesehatan Agenda 6 Tahun 2015 membahas Pedoman Penggunaan Lembaga Keuangan yang diumumkan pada 7 Agustus 2015. Sebagai dasar pembayaran subsidi, Menteri Peraturan Keuangan Nomor 146 Tahun 2015 telah mengumumkan yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2015. Keputusan Pengeluaran KUR dituangkan dalam Kebijakan Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Keuangan UMKM Nomor 186 Tahun 2015.

Pada Oktober 2015, pemerintah meninjau Proyek KUR di tahun 2015. Untuk meluaskan program KUR pada tahun 2015 maka plafon tahunan KUR 2015 dilakukan secara maksimal. Beberapa peraturan telah diundangkan, yaitu Peraturan Komisi Pengatur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur dan Penjamin KUR.

Mula operasionalnya, KUR terbagi menjadi dua strategi, yaitu KUR Mikro dan Ritel. KUR Mikro diberikan dengan maksimal Rp. 25 juta dan menerima plafond tahun 2015 sebesar Rp. 20 triliun dengan bunga 7%. KUR Ritel dibagi dengan plafond di atas Rp. 25 juta - Rp. 50 juta dan menerima plafon di tahun 2015 sebesar Rp. 10 triliun dengan kontribusi bunga 3%. Selain kedua model tersebut, sejak November 2015 KUR juga telah membagi penempatan TKI dengan plafond maksimal Rp. 25 juta dengan tingkat bunga 12%.

Perekonomian Provinsi Lampung digerakkan oleh tiga (3) lapangan usaha utama yaitu:

1.	Pertanian	30.40%
2.	Industri pengolahan	18.91%
3.	Perdagangan	11.42%

Tabel 1. Perekonomian Provinsi Lampung

Sedangkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DI Provinsi Lampung berjumlah 157.922 unit usaha dengan rincian sebagai berikut:

1.	Sektor usaha mikro	101.051 unit
2.	Sektor usaha kecil	11.356 unit
3.	Sektor usaha menengah	547 unit

Tabel 2. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) DI Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian-uraian deskriptif tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **PERANAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT BANK LAMPUNG KANTOR CABANG BANDAR JAYA TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI BANDAR JAYA**”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya terhadap perkembangan UMKM di Bandar Jaya.
2. Bagaimana perkembangan UMKM setelah menerima pinjaman KUR pada PT Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan KUR pada PT Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya terhadap perkembangan UMKM di Bandar Jaya.
2. Untuk mengetahui perkembangan UMKM setelah menerima pinjaman KUR pada PT Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
sebagai pemecahan suatu masalah dan penulis dapat menambah wawasan di dalam teori yang didapatkan dari perkuliahan.
2. Bagi pengembangan ilmu

dijadikan pedoman penelitian selanjutnya yang terkait dengan judul penelitian.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini sebagai bahan referensi atau digunakan untuk mahasiswa dengan tujuan penelitian yang sama.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Bab ini menjelaskan pembahasan prinsip-prinsip teoritis dan aspek-aspek tertentu dari penelitian teoritis yang telah dibahas di masa lalu dan terkait dengan tema Tugas Akhir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan waktu, tempat, dan metode pengumpulan data selama pembahasan yang dilakukan oleh PT Bank Lampung KC Bandar Jaya.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang materi dan pembahasan PT Bank Lampung KC Bandar Jaya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menerangkan simpulan pengelolaan dan pembahasan peranan KUR dan pengembangan UMKM setelah memperoleh KUR dari PT Bank Lampung KC Bandar Jaya terhadap perkembangan UMKM di bandar jaya.

Daftar Pustaka

Lampiran